Jurnal Informatika Komputer
Vol. 1 No. 1 2023
DOI: 10.xxx.

Analisis Kelembagaan Irigasi Dalam Rangka Kebijakan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif Studi Kasus: Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Provinsi Lampung

Andi Danata AR
Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Lampung
andi@itsnulampung.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal kelembagaan berupa kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman pada kelembagaan pengelolaan irigasi, serta (2) menentukan alternatif-alternatif strategi pada Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Provinsi Lampung. Kajian kelembagaan pengelolaan irigasi dalam kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif kasus kelembagaan pengelolaan irigasi Provinsi Lampung menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis SWOT faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Provinsi Lampung adalah: (1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah dan sejumlah peraturan menteri yang mengatur pelaksanaan lebih lanjut ketentuan-ketentuan bidang irigasi, (2) investasi pemerintah daerah dalam bidang irigasi dalam 30 tahun terakhir, (3) peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A serta (4) potensi daerah irigasi kewenangan Provinsi Lampung. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang kelembagaan pengelolaan irigasi adalah: (1) pemerintah daerah berkemampuan dalam penyediaan dana pengembangan dan pengelolaan irigasi, (2) pemerintah memiliki komitmen dalam mengembangkan program ketahanan pangan, (3) potensi sumberdaya alam yang mendukung untuk pertanian beririgasi, (4) pemerintah daerah berkomitmen untuk mereformasi sektor sumber daya air dan irigasi, (5) paradigma baru dalam disentralisasi bidang irigasi. Urutan proritasnya hasil SWOT sebagai berikut: (1). mengefektifkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah dan sejumlah peraturan menteri bidang irigasi untuk mendukung reformasi dan desentralisasi bidang irigasi, (2) meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani P3A/GP3A/IP3A dengan memanfaatkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan program ketahanan pangan didukung dengan potensi sumber daya alam untuk mendukung pertanian beririgasi, (3) memperbaiki investasi pemerintah daerah dalam bidang irigasi dan mengoptimalkan potensi daerah irigasi dengan memanfaatkan dukungan penyediaan dana pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Kata-kata kunci: **Irigasi, Pengelolaan Sistem, Kelembagaan Irigasi**

Abstract

The main purpose of this research were: (1). analyze the factors of internal and external institutional strengths, weaknesses, opportunities and threats to the institutional management of irrigation (2). determine the policy strategy alternatives at the institutional management of irrigation Lampung Province. Institutional study of irrigation management in policy development and participatory management of irrigation systems irrigation management institutional case

Lampung province use SWOT and AHP analysis. Based on the results of analysis SWOT factors internal to be institutional power of Lampung province irrigation management are: (1) law number 17 of 2019 on water resources and the government regulation and a number of regulations governing the implementation of further the provisions of irrigation (2). local government investment in irrigation in the last 30 years, (3) the role of local government in empowering P3A/GP3A/IP3A, (4) potential areas of Lampung provincial irrigation authority. While external factors into opportunities of irrigation management institutions are; (1) government are able to provide of funds the development and management of irrigation, (2) the government is committed to developing a food security program, (3) the potential of natural resources that support for irrigated agriculture, (4) the government is committed to repair sectors of water resources and irrigation. (5) a new paradigm in the field of centralized irrigation. The main purpose the result of SWOT as follows; (1) effective implementation of Law No 17 of 2019 on water resources and the government regulations to support the reform and decentralization of irrigation effectively, (2) increase the role of local government in empowering farmers P3A/GP3A/IP3A by utilizing the government's commitment in developing a food security program is supported by the potential of natural resources to support irrigated agriculture, (3) improve local government investment in irrigation and use of the potential irrigation area by providing funds to support irrigation development and management of government.

Keywords: Irrigation, System Management, Irrigation Institutionalization

PENDAHULUAN

Sumber daya air irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian memiliki peran yang sangat penting. Perubahan tujuan pembangunan pertanian saat ini, dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi: (1) peningkatan produksi dan swasembada berkelanjutan; (2) ketahanan pangan dan gizi; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; (4) peningkatan pendapatan petani; dan (5) adaptasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan (*Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap*, 2010). Kebijakan pemanfaatan sumberdaya air irigasi di Indonesia selama ini dialokasikan untuk keperluan irigasi terutama untuk penanaman padi, dan kebijakan seperti ini akan terus berlangsung pada masa yang akan datang. Kebijakan tersebut bukan hanya menyangkut alokasi air, tetapi juga termasuk sistem penyediaan, pengelolaan dan cara-cara pembiyaaan suberdaya air irigasi (Suciwati, 2005).

Pembaruan dan penataan kelembagaan pengelolaan irigasi telah dirintis sejak Tahun 1999. Pada masa itu telah ditetapkan beberapa produk kebijakan pemerintah mulai dari Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembaruan kebijakan pengelolaan irigasi (PKPI) sampai Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi. Sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan sumber daya air dan irigasi, dan untuk meningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Maka peraturan tersebut diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, srta Peraturan Pemerintah dan Menteri tentang Irigasi. Dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi. Adapun *stakeholders* kelembagaan pengelolaan irigasi yang membidangi irigasi meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air dan komisi irigasi.

Perubahan perundangan dan peraturan pemerintah juga mempengaruhi kebijakan bidang irigasi yaitu adanya perubahan program kebijakan dari pembaruan kebijakan pengelolaan irigasi)menjadi kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif. Selain itu juga terjadi perubahan, antara lain pada pola partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi, yaitu dari pola penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi menjadi pola pengelolaan irigasi partisipatif. Pola yang terbaru diselenggarakan antara lain melalui kerjasama pengelolaan irigasi.

Kebijakan-kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif diwujudkan untuk meningkatkan kemampuan pengelola irigasi, petani pemakai air dan penerima manfaat irigasi lainnya dalam melaksanakan pengelolaan irigasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan sistem irigasi. Selain itu pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian yang diselenggarakan secara partisipatif terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Pendayagunaan sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi saat ini, ditekankan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi. Kemudian rehabilitasi pada areal irigasi befungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Menurut Rosegrant dkk (2002), pengelolaan operasi dan pemeliharaan tidak memiliki kapabilitas yang memadai untuk sekedar mempertahankan kinerja fungsi irigasi seperti desain semula. Ini disebabkan oleh banyak faktor dan beragam di antaranya adalah; (a) disain kelembagaan irigasi tidak sesuai dengan aspirasi pengguna, (b) sistem kelembagaan yang tidak efisien karena prilaku penumpang gelap *(free rider)* dan praktek-praktek pencarian keuntungan *(rent seeking)*, dan (c) degradasi kemandirian komunitas petani dalam pengelolaan irigasi akibat kooptasi yang berlebihan dari pemerintah dalam pengembangan irigasi.

Selain itu terdapat permasalahan lain yang dihadapi oleh kelembagaan pengelolaan irigasi Provinsi Lampung, adalah belum tercipta keberlanjutan dalam aspek output yang jelas dalam implementasi dari setiap program PPSIP. Menurut Setiawan (2008) dinamika struktur politik dan birokrasi pemerintahan merupakan faktor utama yang menyebabkan tidak kondusifnya implementasi dan tidak berkelanjutannya program. Secara lebih spesifik, lemahnya manajemen kelembagaan di dalam implementasi kebijakan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif, terutama dalam birokrasi pemerintahan pada berbagai tingkatan, serta lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antar sektor terkait, antar kepengurusan pemerintahan dan antar tingkatan pemerintahan, serta hubungan dengan penerima manfaat merupakan faktor penting yang dapat menghambat efekivitas dan keberlanjutan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab penelitian ini adalah sebagai berikut; (1) Apasajakah faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman kelembagaan pengelolaan irigasi dalam implementasi kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif Provinsi Lampung?, (2) apasajakah alternatif-alternatif strategi kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif pada Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Provinsi Lampung?.

Tujuan penelitian ini adalah; (1) menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal

berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada kelembagaan pengelolaan irigasi dalam implementasi kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif Provinsi Lampung, dan (2) menganalisis dan menentukan alternatif-alternatif strategi kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif pada Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Provinsi Lampung.

Hasil penelitan ini diharapkan menjadi masukan bagi pengambil kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, khususnya bagi pelaksana program kebijakan PPSIP yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung, Dinas Pengairan Provinsi Lampung dan pihak terkait dalam hal ini Komisi Irigasi, masyarakat tani (P3A/GP3A/IP3A) dan para pihak terkait lainnya dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif di Provinsi Lampung. Penelitan ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti yang mengambil topik yang berkaitan ataupun pihak yang tertarik dengan permasalahan yang diteliti.

METODE PENELITIAN

Menurut David (2009) kekuatan dan kelemahan internal merupakan aktivitas terkontrol suatu organisasi yang mampu dijalankan dengan sangat baik atau buruk keadaan ini muncul dalam manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan. Sedangkan peluang dan ancaman eksternal menunjuk pada berbagai *trend* dan kejadian ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan hidup, politik, hukum, pemerintahan, teknologi, dan kompetitif yang dapat secara signifikan menguntungkan atau merugikan suatu organisasi di masa yang akan datang.

Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan visi, misi, dan tujuan, kondisi sekarang, kondisi yang akan datang, strategi, dan kebijakan (Akdon, 2007). Sedangkan menurut Ellis (1992), kebijakan didefinisikan sebagai tindakan yang dipilih oleh pemerintah terhadap aspek ekonomi, termasuk tujuan pemerintah dan usaha untuk mencapai dan pilihan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian analisis kebijakan dapat dilakukan melalui faktor-faktor strategi melalui pendekatan analisis SWOT.

Kegiatan pertama yang dilakukan dalam analisa SWOT adalah identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang merupakan tahapan penting karena merupakan dasar untuk kegiatan analisa selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan adalah merumuskan, kemudian meminta masukan dari narasumber yang diyakini menguasai permasalahan untuk melakukan pengurangan, penambahan maupun penajaman terhadap faktor-faktor tersebut melalui kegiatan metode *Focus Group Discussion* (FGD). Dari hasil kuesioner didapatkan persepsi responden terhadap penilaian indikator-indikator utama, yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal pada kelembagaan pengelola irigasi Provinsi Lampung. Penilaian responden dari faktor internal dan eksternal tersebut akan menghasilkan kelompok faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Secara ringkas perhitungan atau pengolahan data hasil penelitian terhadap kuesioner SWOT dari responden, diuraikan dalam bentuk tabel-tabel yang terdiri dari; (a) penilaian faktor internal dan eksternal meliputi bobot faktor internal dan eksternal, dan (b) penilaian robot IFAS-EFAS SWOT meliputi bobot faktor internal dan eksternal.

Responden yang diminta masukkannya pada penelitian ini adalah narasumber yang berperan dalam kelembagaan irigasi yaitu pihak yang berwenang terdiri dari pejabat dan pelaksana kegiatan terdiri dari; Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung, Komisi Irigasi Provinsi Lampung serta Induk dan Gabungan Perkumpuan Petani Pemakai Air (GP3A) terpilih pada Daerah Irigasi Way Rarem Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Tulang Bawang. Hasil Indentifikasi Faktor Internal dan Eksternal SWOT Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Indentifikasi Faktor Internal dan Eksternal SWOT Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Provinsi Lampung

Indikator-Indikator Internal dan Eksternal	
Faktor Internal	Faktor Eksternal
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang SDA dan Peraturan Pemerintah dan sejumlah peraturan menteri yang mengatur pelaksanaan lebih lanjut ketentuan-ketentuan bidang irigasi. 2. Peraturan Daerah tentang Irigasi Provinsi Provinsi Lampung yang belum terbit. 3. Investasi pemerintah daerah dalam bidang irigasi dalam 30 tahun terakhir. 4. Kualitas sumber daya manusia pengelola irigasi. 5. Potensi daerah irigasi kewenangan Provinsi Lampung. 6. Kondisi pelayanan dan infrastruktur irigasi. 7. Dana Pengelolaan Irigasi Provinsi Lampung untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi 8. Peran unsur-unsur kelembagaan dalam Komisi Irigasi Provinsi Lampung. 9. Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.	1. Pemerintah berkomitmen untuk mereformasi sektor sumber daya air dan irigasi. 2. Paradigma baru dalam disentralisasi bidang irigasi. 3. Pemerintah berkemampuan dalam penyediaan dana pengembangan dan pengelolaan irigasi. 4. Pemerintah memiliki komitmen dalam mengembangkan program ketahanan pangan. 5. Partisipasi penerima manfaat irigasi. 6. Kompetisi pengguna air antara petani, masyarakat perkotaan dan industri. 7. Kebijakan impor beras nasional. 8. Alih fungsi lahan pertanian beririgasi. 9. Potensi ketersediaannya air pada daerah tangkapan air *(catchment area)*. 10. Potensi sumberdaya alam yang mendukung untuk pertanian beririgasi.

Kemudian dilakukan analisis matriks SWOT, dengan melakukan interaksi merger (penggabungan) dari kelompok faktor internal *(Strenght, Weakness)*, dengan kelompok faktor eksternal *(Opportunity, Threat)*, yang digambarkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Faktor Internal dan Eksternal

		FAKTOR EKSTERNAL	
		OPPORTUNITY (O)	**THREAT (T)**
FAKTOR INTRNAL	**STRENGTH (S)**	STRATEGI ***SO*** *(Strength-Oppotunity*)	STRATEGI ***ST*** *(Strength-Threat)*
	WEAKNESS (W)	STRATEGI ***WO*** (*Weakness-Opportunity)*	STRATEGI ***WT*** *(Weakness -Threat)*

Hasil kombinasi interaksi strategi SO, WO, ST, dan WT seperti diuraikan pada Tabel 2 menunjukkan sebanyak 4 tindakan atau strategi pilihan yang dapat ditempuh dalam melihat persepsi responden, terhadap berbagai kemungkinan dalam pengambilan keputusan yang dapat dilakukan. Hasil interaksi antara strategi internal dan eksternal, dapat menunjukkan strategi dominan terbaik untuk solusi yang dipilih, sebagai strategi andalan. Analisis matriks SWOT terjadi interaksi pengabungan dari strategi yang meliputi kombinasi interaksi strategi internal-eksternal yang terdiri dari; (1) strategi SO *(Strength-Opportunity)*, menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, (2) strategi ST *(Strength-Threat)*, menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, (3) strategi WO *(Weakness-Opportunity)*, strategi untuk meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang, dan (4) strategi WT *(Weakness-Threat)*, strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman.

Responden pada penelitian ini, ditetapkan secara *purposive sampling* dengan metode tak acak *(nonprobility sampling)*. Menurut Sugiarto dkk (2003), *nonprobability sampling* dikembangkan untuk menjawab kesulitan yang ditimbulkan dalam menerapkan metode acak, terutama dalam kaitannya dengan pengurangan biaya dan permasalahan yang mungkin timbul dalam pembuatan kerangka sampel. Hal ini dapat dimungkinkan karena kerangka sampel tidak diperlukan dalam pengambilan sampel secara *nonprobability*. Bentuk dari metode *nonprobability sampling* yang diterapkan pada penelitian ini adalah sampling pertimbangan *(judgment sampling)*, hal ini berkaitan dengan adanya kepentingan peneliti terhadap responden dan responden memiliki pengetahuan atau pemahaman masalah yang diteliti. Jumlah responden yang melakukan penilaian atau pengisian kuesioner SWOT adalah sebanyak 6 ahli di bidang sumberdaya air dan irigasi, serta kelembagaan pengelola irigasi. Penyebaran kuesioner

SWOT tersebut dimaksudkan untuk menjaring persepsi penilaian responden dalam menentukan bobot dan rating setiap faktor baik internal dan eksternal dari pihak-pihak pemangku kepentingan dalam Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Provinsi Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabungan, Pembobotan Internal Faktor Analysis System (IFAS) dan (Eksternal Faktor Analysis System (EFAS)

Menurut David (2009), kekuatan dan kelemahan internal merupakan aktivitas terkontrol suatu organisasi yang mampu dijalankan dengan sangat baik atau buruk keadaan ini muncul dalam manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan. Sedangkan peluang dan ancaman eksternal menunjuk pada berbagai *trend* dan kejadian ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan hidup, politik, hukum, pemerintahan, teknologi, dan kompetitif yang dapat secara signifikan menguntungkan atau merugikan suatu organisasi di masa yang akan datang.

Pengabungan atau merger nilai bobot rating IFAS dan EFAS digunakan dalam menentukan prioritas dalam analisis matriks SWOT, dengan melakukan interaksi penggabungan dari kelompok faktor internal *(strength, weakness)*, dengan kelompok faktor eksternal *(opportunity, threat)*. Setelah dilakukan pengabungan kekuatan dan kelemahan pada faktor internal serta peluang dan ancaman pada faktor eksternal, selanjutnya dilakukan penilaian pembobotan IFAS-EFAS elemen SWOT dengan cara penilaian sebagaimana pada Tabel 3.

BOBOT FAKTOR INTERNAL					
S t e r n g t h	No.	**PENYESUAIAN NILAI RATA-RATA (bi)**	**Bobot (%)**	**Urgensi**	**Bobot x Rating**
		[NILAI RATA-RATA - 5]	**(bi/Xsi)*Bs**	**(Rating)**	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1	2.17	16.05	3.67	0.59
	3	2.00	14.81	3.17	0.47
	5	1.50	11.11	3.00	0.33
	9	1.67	12.35	3.67	0.45
	Total **S** (Xsi)=	**7.33**	**54.32**		**1.84**
W e a k n e s s	No.	**PENYESUAIAN NILAI RATA-RATA (bi)**	**Bobot (%)**	**Urgensi**	**Bobot x Rating**
		[NILAI RATA-RATA - 5]	**(bi/Xwi)*Bw**	**(Rating)**	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2	2.00	14.81	3.17	0.47
	4	1.17	8.64	3.50	0.30
	6	2.17	16.05	3.67	0.59
	7	0.17	1.23	3.83	0.05
	8	0.67	4.94	2.83	0.14

	Total **W** (Xwi)=	**6.17**		**45.68**		**1.55**			
TOTAL (Xi) = (Xsi + Xwi) =		**13.50**							
Bs = (Xsi/Xi)x100%=		**54.32**		**Bw** = (Xwi/Xi)x100%=		**45.68**			
BOBOT FAKTOR EKSTERNAL									
Opportunity	No.	**PENYESUAIAN NILAI RATA-RATA (be)**		**Bobot (%)**		**Urgensi**		**Bobot x Rating**	
		[NILAI RATA-RATA - 5]		**(be/Xoe)*Bo**		**(Rating)**			
	(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	
	1	1.83		9.73		2.83		0.28	
	2	1.67		8.85		2.17		0.19	
	3	2.83		15.04		3.50		0.53	
	4	2.67		14.16		3.50		0.50	
	10	2.83		15.04		3.33		0.50	
	Total **O** (Xoe)=	**11.83**		**62.83**				**1.99**	
Threat	No.	**PENYESUAIAN NILAI RATA-RATA (be)**		**Bobot (%)**		**Urgensi**		**Bobot x Rating**	
		[NILAI RATA-RATA - 5]		**(be/Xte)*Bt**		**(Rating)**			
	(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	
	5	1.33		7.08		2.33		0.17	
	6	1.17		6.19		3.67		0.23	
	7	0.83		4.42		2.67		0.12	
	8	2.00		10.62		3.83		0.41	
	8	1.67		8.85		3.50		0.31	
	Total **T** (Xte)=	**7.00**		**37.17**				**1.23**	
TOTAL (Xe) = (Xoe + Xte) =		**18.83**							
Bo = (Xoe/Xe)x100%=		**62.83**		**Bt**= (Xte/Xe)x100%=		**37.17**			

Tabel 3. penilaian pembobotan IFAS-EFAS

Berdasarkan Tabel 3 didapatkan hasil penilaian pembobotan IFAS terlihat bahwa total bobot rating faktor kekuatan didapatkan nilai sebesar **1,84** dan faktor kelemahan didapatkan nilai sebesar **1,55**. Sedangkan hasil penilaian pembobotan EFAS terlihat bahwa total bobot rating faktor peluang didapatkan nilai sebesar **1,99** dan faktor ancaman didapatkan nilai sebesar **1,23**.

Perumusan Proritas Strategi dengan Analisis SWOT

Hasil interaksi IFAS-EFAS yang menghasilkan alternatif strategi yang mendapatkan

bobot tertinggi adalah *Strength-Opportunity* (SO), diterjemahkan sebagai strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Dengan hasil ini Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Provinsi Lampung mempunyai tugas untuk mengoptimalkan peran kelembagaaan dalam keberhasilan implementasi kebijakan PPSIP Provinsi Lampung. Karena dari sisi internal kelembagan bobot kekuatan kelembagaan lebih besar daripada kelemahan kelembaagan (S>W). Sedangkan dari sisi eksternal kelembagan bobot peluang kelembagaan lebih besar daripada ancaman kelembaagan (O>T). Susunan strategi SWOT berdasarkan alternatif urutan prioritasnya dengan pengabungan pembobotan interaksi IFAS dan EFAS dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Prioritas Berdasarkan pembobotan Interaksi SWOT Materik IFAS EFAS

Internal Faktor Analysis System (IFAS) *Eksternal Faktor Analysis System (EFAS)*	**Kekuatan (S):** 1. Regulasi pemerintah berupa terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang SDA dan Peraturan Pemerintah tentang Irigasi dan sejumlah peraturan menteri yang mengatur pelaksanaan lebih lanjut ketentuan-ketentuan bidang irigasi. 2. Investasi pemerintah daerah dalam bidang irigasi dalam 30 tahun terakhir. 3. Potensi daerah irigasi kewenangan Provinsi Lampung. 4. Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A. **1,84**	**Kelemahan (W):** 1. Peraturan Daerah tentang Irigasi Provinsi Provinsi Lampung. 2. Kualitas sumber daya manusia pengelola irigasi. 3. Kondisi pelayanan dan infrastruktur irigasi. 4. Dana Pengelolaan Irigasi Provinsi Lampung untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. 5. Peran unsur-unsur komisi irigasi dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi. **1,55**
Peluang (O): 1. Pemerintah berkomitmen untuk mereformasi sektor sumber daya air dan irigasi. 2. Paradigma baru dalam disentralisasi bidang irigasi. 3. Pemerintah berkemampuan dalam penyediaan dana pengembangan dan pengelolaan irigasi. 4. Pemerintah memiliki komitmen dalam mengembangkan program ketahanan pangan. 5. Potensi sumber daya alam yang mendukung untuk pertanian beririgasi. **1,99**	1. Mengefektifkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah tentang Irigasi dan sejumlah peraturan menteri bidang irigasi untuk mendukung reformasi dan desentralisasi bidang irigasi **(S1,O2,O3)**. 2. Memperbaiki investasi pemerintah daerah dalam bidang irigasi dan mengoptimalkan potensi daerah irigasi dengan memanfaatkan dukungan penyediaan dana pengembangan dan pengelolaan irigasi dari pemerintah **(S2,S3,O3)**. 3. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dengan memanfaatkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan program ketahanan pangan didukung dengan potensi sumber daya alam untuk mendukung pertanian beririgasi **(S1,O4,O5)**. **3,83**	1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi Provinsi Provinsi Lampung dengan memanfaatkan dukungan komitmen pemerintah untuk mereformasi dan desentralisasi sektor irigasi **(W1,O2,O3)**. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola irigasi dan peran unsur-unsur kelembagaan komisi irigasi dengan memanfaatkan dukungan komitmen pemerintah untuk mereformasi dan desentralisasi sektor irigasi **(W2,W5,O2,O3)**. 3. Memperbaiki kondisi pelayanan dan infrastruktur irigasi dan penyediaan dana pengelolaan irigasi dengan memanfaatkan dukungan pemerintah dalam penyediaan dana dan pengembangan program ketahanan pangan serta potensi sumberdaya alam untuk pertanian beririgasi **(W2,W3,O3,O4,O5)**. **3,54**
Ancaman (T): 1. Partisipasi penerima manfaat irigasi. 2. Kompetisi pengguna air antara petani, masyarakat perkotaan dan industri. 3. Kebijakan impor beras nasional. 4. Alih fungsi lahan pertanian beririgasi. 5. Potensi ketersediaannya air pada daerah tangkapan air *(catchment area)*. **1,23**	1. Mengefektifkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang SDA dan Peraturan Pemerintah tentang Irigasi dan sejumlah peraturan menteri bidang irigasi untuk meningkatkan partisipasi penerima manfaat irigasi serta mengurangi kompetisi pengguna air antara petani, masyarakat perkotaan dan industri **(S1,T1,T2)**. 2. Meningkatkan investasi pemerintah daerah dalam bidang irigasi dan dukungan potensi daerah irigasi untuk mengurangi kebijakan impor beras nasional dan alih fungsi lahan pertanian beririgasi **(S2,T3,T4)**. 3. Meningkatkan Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A untuk meningkatkan kelestarian potensi ketersediaannya air pada daerah tangkapan air *(catchment area)* **(S4,T5)**. **3,07**	1. Wewujudkan Peraturan Daerah tentang Irigasi Provinsi Provinsi Lampung dalam menghadapi ancaman rendahnya partisipasi penerima manfaat irigasi dan kompetisi pengguna air antara petani, masyarakat perkotaan dan industri **(W1,T1,T2)**. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas pengelola irigasi dan peran unsur-unsur kelembagaan irigasi dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, dalam menghadapi ancaman rendahnya partisipasi penerima manfaat irigasi dan kompetisi pengguna air antara petani, masyarakat perkotaan dan industri **(W1,W5,T1,T2)**. 3. Memperbaiki kondisi pelayanan dan infrastruktur irigasi dan penyediaan dana pengelolaan irigasi, untuk mengurangi impor beras nasional dan alih fungsi lahan serta ancaman berkurangnya potensi ketersediaan air pada daerah tangkapan air *(catchment area)* **(W1,W2,T3,T4,T5)**. **2,78**

Ditetapkannya atau dipilihnya strategi *Strength-Opportunity* (SO) yang mendapat bobot nilai **3,82** sebagai prioritas terpenting untuk diterapkan, bukan berarti strategi lainnya yang memiliki bobot lebih rendah tidak bermanfaat dan tidak perlu diterapkan. Apabila diinginkan hasil yang maksimal maka strategi yang baik WO, ST dan WT perlu untuk dilaksanakan, apabila sumberdaya yang dimiliki Kelembagaan Pengelola Irigasi Provinsi Lampung mendukung.

Strategi prioritas pertama *Strength-Opportunity* (SO) atau strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, berdasarkan analisis SWOT, KPI Provinsi Lampung dapat menciptakan pertumbuhan yang agresif dalam mendukung implementasi kebijakan PPSIP dengan beberapa strategi sebagai berikut; (1) mengefektifkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah te dan sejumlah peraturan menteri bidang irigasi untuk mendukung reformasi dan desentralisasi bidang irigasi, (2) meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani P3A/GP3A/IP3A dengan memanfaatkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan program ketahanan pangan didukung dengan potensi sumber daya alam untuk mendukung pertanian beririgasi, serta (3) memperbaiki investasi pemerintah daerah dalam bidang irigasi dan mengoptimalkan potensi daerah irigasi dengan memanfaatkan dukungan penyediaan dana pengembangan dan pengelolaan irigasi dari pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Faktor-faktor internal Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Provinsi Lampung adalah; (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah tentang Irigasi dan sejumlah peraturan menteri yang mengatur pelaksanaan lebih lanjut ketentuan-ketentuan bidang irigasi, (2) investasi pemerintah daerah dalam bidang irigasi dalam 30 tahun terakhir, (3) peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dan (4) potensi daerah irigasi kewenangan provinsi. Faktor-faktor eksternal Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Provinsi Lampung untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan implementasi kebijakan PPSIP adalah; (1) pemerintah berkemampuan dalam penyediaan dana pengembangan dan pengelolaan irigasi, (2) pemerintah memiliki komitmen dalam mengembangkan program ketahanan pangan, (3) potensi sumberdaya alam yang mendukung untuk pertanian beririgasi, (4) pemerintah berkomitmen untuk mereformasi sektor sumber daya air dan irigasi, serta (5) paradigma baru dalam disentralisasi bidang irigasi.

Hasil SWOT berdasarkan interaksi IFAS-EFAS yang menghasilkan alternatif strategi yang mendapatkan bobot tertinggi adalah *strength-opportunity* (SO), diterjemahkan sebagai interaksi kombinasi strategi SO merupakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Prioritas strategi SWOT dengan menggunakan analisis AHP, kelembagaan pengelolaan irigasi Provinsi Lampung dalam kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif adalah:

Mengefektifkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerinatah tentang Irigasi serta sejumlah peraturan menteri bidang irigasi untuk mendukung reformasi dan desentralisasi bidang irigasi.

Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A

dengan memanfaatkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan program ketahanan pangan didukung dengan potensi sumber daya alam untuk mendukung pertanian beririgasi.

Memperbaiki investasi pemerintah daerah dalam bidang irigasi dan mengotimalkan potensi daerah irigasi dengan memanfaatkan dukungan penyediaan dana pengembangan dan pengelolaan irigasi dari pemerintah.

Pemerintah Provinsi Lampung melanjutkan dan meningkatkan revitalisasi peran kelembagaan pengelolaan irigasi pemerintah melalui program peningkatan tata pengaturan pengelolaan irigasi yang partisipatif serta peningkatan kinerja lembaga lain yang terlibat dalam pengelolaan irigasi partisipatif, dalam hal ini perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) dan Komisi Irigasi Provinsi Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia perangkat daerah pengelola irigasi dengan mengoptimalkan program peningkatan kemampuan kinerja perangkat daerah, agar dapat diwujudkan peningkatan kinerja pelayanan irigasi oleh perangkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi partisipatif.

Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan percepatan penetapan dan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Irigasi Provinsi Lampung. Serta merevitalisasi dan meredefinisikan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) lembaga pengelola irigasi dengan berpedoman kepada produk-produk hukum yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Lampung mengefektifkan kelembagaan komisi irigasi provinsi dengan memperhatikan keanggotaan yang jelas dan tetap (meskipun berdasarkan keterwakilan kelembagaan), sumberdana yang jelas dan berkelanjutan (baik dari proyek maupun *sharing* daerah), program yang produktif untuk menyelesaikan permasalahan (tidak ketergantungan terhadap proyek), pergantian periode kepengurusan dan keanggotaan yang jelas (termasuk manajemen, data dan informasinya, agar berkelanjutan), dan komisi irigasi memiliki akses ke jaringan kelembagaan irigasi baik secara vertikal, horizontal dan diagonal.

DAFTAR PUSTAKA

Akdon. 2007. *Strategic Management For Education Management* (Manajemen Strategik Untuk Pendidikan). Penerbit Alfabet. Bandung.

[Bapenas] Kementrian Perencanaan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2010. *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap* (ICCSR): Sektor Pertanian. Jakarta

[Bappeda] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. 2008. Laporan Training Need Assesment Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif. Satker Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air.

Bourgeois R. 2005. *Analytical Hierarchy Process: An Overview*, UNCAPSA. UNESCAP.

David R. 2009. *Manajemen Strategis Konsep*. Salemba Empat. Jakarta.

Ellis F. 1992. *Agricultural Policies In Developing Countries*. Cambridge University Press. New York.

[NPMU WISMP] *National Project Management Unit Water Resources and Irrigation Sector Management Project*. 2008. Laporan Utama *Project Management Manual* (PMM).

Direktorat Bina Program. Bappenas. Jakarta.

Rosegrant, dkk. 2002. *World Water and Food to 2025: Dealing With Scarcity. International Food Policy Research Institute (IFRI)*. Washington, D.C.

Setiawan. 2008. Dampak Program Pembangunan Irigasi Partisipatif Terhadap Dinamika Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air Di Indonesia. Makalah Lokakarya *Water and Sanitation Project Trust Fund*. Bangda Depdagri. Jakarta.

Suciati L. 2005. Strategi Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Pembiayaan Pengelolaan Irigasi. Tesis Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.

Sugiarto dkk. 2003. *Teknik Sampling*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

[WISMP-IMRI] *Water Resources and Irrigation Sector Management Project-Irrigation Management Reform Implementation*. 2010. Panduan Penyusunan Program AWP 2011. Departemen PU Direktorat Simberdaya Air Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.